ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB)
DI KOTA BANDUNG
(Suatu Studi Pada Peraturan Walikota Bandung No. 004 Tahun 2011)

Oleh:
Iqbal Januar
Nim : 41708815
Skripsi ini dibawah bimbingan
Dr. Dewi Kurniasih S.IP., M.Si

Program KB merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Bandung, tetapi didalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan seperti kurangnya sosialisasi program KB kepada masyarakat, tingginya laju pertumbuhan penduduk, rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak reproduksi, dan kurangnya petugas KB di lapangan.

Berdasarkan hasil peneltian menunjukan bahwa implementasi kebijakan program KB di Kota Bandung dalam proses komunikasi yang disampaikan aparatur dan petugas di lapangan belum berjalan baik, dikarenakan sosialisasi yang masih kurang. Sumber daya manusia di BPPKB Kota Bandung kurang baik karena kekurangan pegawai dan petugas di lapangan, Disposisi di BPPKB Kota dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Struktur Birokrasi di BPPKB Kota Bandung berjalan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maka implementasi kebijakan program KB di Kota Bandung cukup berhasil.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Program Keluarga Berencana

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk dinamika kependudukan dan pembangunan keluarga. Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan belum menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan yang cepat dan kualitas yang rendah akan menghambat proses pembangunan.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatur permasalahan kependudukan adalah program Keluarga Berencana (KB). Pada zaman orde baru program KB ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan sentralisasi, tetapi memasuki era reformasi program KB ini diwenangkan kepada pemerintah daerah karena di era otonomi daerah ini pemerintah daerah mempunyai kekuasaan penuh terhadap berbagai macam kebijakan termasuk program KB.

Bandung sebagai kota metropolitan dengan berbagai macam masalah kependudukan dan juga mobilitas penduduk yang tinggi diperlukan suatu formula untuk mengatasinya yaitu dengan program KB yang berguna untuk menekan angka laju pertumbuhan penduduk dan untuk mengatur perencanaan keluarga sehingga proses pembangunan berjalan secara berkelanjutan. Program KB merupakan salah satu program pembangunan sehingga dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Program KB merupakan salah satu program prioritas dari pemerintah Kota Bandung, tetapi di dalam pelaksanaannya selalu menghadapai berbagai macam permasalahan seperti tingginya laju pertumbuhan penduduk yang akan menjadi beban bagi pembangunan nasional, rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak reproduksi, Selain itu, pada bulan maret 2014 jumlah petugas KB di lapangan adalah 100 orang, tetapi itu tidak cukup untuk melayani 151 kelurahan di Kota Bandung karena menurut Standar Pelayanan Minimum yaitu 1 kelurahan 1 petugas KB.

Permasalahan berikutnya dalam pelaksanaan program KB di Kota Bandung adalah kurangnya sosialisasi program KB kepada masyarakat, dari sumber daya manusia kekurangan petugas KB di lapangan, disposisi pada BPPKB Kota Bandung diterjemahkan dengan kurang berkomitmen dan kejujuran pada implementasi kebijakan, terdapat beberapa aspek yang belum sesuai prosedur pada struktur birokrasi.

Program KB di Kota Bandung sangat mempengaruhi pembangunan di berbagai bidang, seperti pembangunan fisik, sosial budaya, dan ekonomi. Banyaknya jumlah penduduk bisa juga mempengaruhi jumlah pendapatan per kapita, tetapi kesemuanya itu tergantung dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Apabila penduduk dikelola dengan baik akan bermanfaat bagi pembangunan, tetapi apabila penduduk tidak dikelola dengan baik akan menjadi beban bagi pembangunan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan program KB di Kota Bandung?

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan program KB di Kota Bandung. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi pada implementasi kebijakan program KB di Kota Bandung.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan, yaitu bersifat praktis dan teoritis yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegunaan bagi peneliti
   Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengalaman, wawasan, pengetahuan dan memberikan pemahaman bagi peneliti mengenai implementasi kebijakan program KB di Kota Bandung.
2. Kegunaan teoritis
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan, maupun studi yang peneliti ambil di program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Komputer Indonesia, khususnya dalam rangka mengembangkan teori-teori mengenai konsep teori implementasi kebijakan.
3. Kegunaan praktis
   Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi BPPKB Kota Bandung dalam rangka melaksanakan program KB di Kota Bandung.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Hal tersebut sejalan dengan pendapat George C. Edwards III dalam bukunya *Implementing Public Policy* yaitu:

> "Implementasi kebijakan, maka dapat dikatakan bahwasannya implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan seperti bagian dari tindakan legislatif, menerbitkan perintah eksekutif, penyerahan keputusan peradilan, atau diterbitkannya suatu peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi orang-orang yang mempengaruhinya."
> (Edwards III, 1980:01).

Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan diatas bahwa

implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik. Tachjan mengatakan implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Kebijakan Publik* bahwa:

> "Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat kongkrit atau makro" (Tachjan, 2006:25).

Menurut pernyataan tersebut, bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau proses pelaksanaan kebijakan setelah kebijakan selesai dirumuskan. Implementasi merupakan tahap paling penting karena pada tahap ini kebijakan dapat dinilai berhasil atau tidak. Adapun unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu :

1. Unsur pelaksana
2. Adanya program yang dilaksanakan serta
3. Target group atau kelompok sasaran.

(Tachjan 2006:26).

Menurut Tachjan tiga kebijakan di atas wajib ada karena itu merupakan penentu berjalannya suatu kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Edward III mengemukakan beberapa hal mengenai komponen-komponen model sistem implementasi kebijakan, yaitu:

1. *Communication*,
2. *Resource,*
3. *Dispositions,*
4. *Bureaucratic Structure*.

(Edward III, 1980:12).

Masing-masing dari berbagai faktor di atas bukan hanya secara langsung mempengaruhi implementasi, melainkan secara tidak langsung mempengaruhi masing-masing dari faktor lainnya. Berikut model gambar implementasi kebijakan oleh Edward III:

Program Keluarga Berencana (KB)

Keluarga Berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan

sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, Intra Uterine Device (IUD), dan sebagainya. Jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah dua.

Pengertian KB menurut World Health Organization (WHO), KB adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami isteri untuk : Mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan dan menentukan jumlah anak, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, dan mengontrol waktu saat kelahiran dengan umur suami dan isteri Program KB adalah suatu langkah-langkah/suatu usaha kegiatan yang disusun oleh organisasi-organisasi KB dan merupakan program pemerintah untuk mencapai rakyat yang sejahtera berdasarkan peraturan dan perundang-undangan kesehatan.

Pengertian KB berdasarkan Undang-Undang No. 52 tentang PKPK. KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Definisi KB menurut BKKBN adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Penjelasan atas pengertian program KB di atas, bahwa program KB adalah upaya dari pemerintah untuk mengatur atau mengendalikan angka pertumbuhan penduduk, mengatur jarak kelahiran ideal melalui alat kontrasepsi untuk mencapai keluarga kecil bahagia agar tidak terjadi kepadatan penduduk, karena motto KB adalah 2 anak cukup.

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Kota Bandung sebagai kota metropolitan pada saat ini dihadapkan dengan kondisi kependudukan yang rumit, hal ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam upaya membangun SDM berkualitas. Memasuki era desentralisasi yang ditandai dengan penyerahan urusan KB kepada pemerintah Kabupaten dan Kota dalam hal ini pengelolaan program KB dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Badan atau lembaga yang menangai program KB di Kota Bandung adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB).

Visi dari BPPKB Kota Bandung adalah mewujudkan Keluarga Sejahtera, Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak, dasar penetapan visi :

1. Masih tingginya jumlah keluarga dengan kategori Pra-Sejahtera dan Sejahtera-I.
2. Masih tingginya kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan.
3. Masih rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak.
4. Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam mengkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan serta perlindungan anak.

Misi dari BPPKB Kota Bandung yaitu mewujudkan kesetaraan gender, meningkatkan pelayanan pada pemberdayaan perempuan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program KB dengan rincian sebagai berikut :

1. Mengendalikan *Total Fertility Rate* (TFR) melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam program KB.
2. Mengembangkan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kategori Pra-Sejahtera dan Sejahtera-1 melalui program ekonomi produktif.
4. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kategori Pra-Sejahtera dan Sejahtera-1 melalui program ekonomi produktif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Peneliti menggambarkan serta menjelaskan secara menyeluruh keadaan, kondisi dan peristiwa dari obyek kajian peneliti yaitu mengenai implementasi kebijakan program KB di Kota Bandung, kemudian peneliti memberikan analisa dan kesimpulan terhadap hasil penelitian berdasarkan data-data obyektif dilapangan yang disusun secara sistematis.

Uji keabsahan data yang dilakukan adalah peneliti menggunakan triangulasi sumber data dengan cara menggali informasi melalui wawancara dan observasi, selain itu peneliti menggunakan dokumen tertulis, catatan resmi dan gambar atau foto. Berbagai cara tersebut akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kehandalan data. Karena itu, dengan cara triangulasi sumber data maka peneliti dapat mengecek kebenaran informasi atau validasi data tentang pelaksanaan program KB di Kota Bandung yang diperoleh peneliti dari sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi saat pengumpulan dan analisis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Komunikasi antara Aparatur BPPKB Kota Bandung dengan Akseptor Keluarga Berencana (KB)

Implementasi kebijakan program KB dapat berjalan dengan baik apabila proses komunikasi yang dilakukan oleh pihak BPPKB Kota Bandung dalam menjalankan program KB dilakukan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tujuan dan sasaran program KB, tetapi apabila komunikasi tidak dijalankan dengan baik maka pelaksanaan program KB tidak akan berjalan maksimal. Komunikasi dalam implementasi program KB melalui penyampaian kejelasan informasi dan adanya konsistensi penyampaian informasi akan membuat proses komunikasi yang baik dan mendorong aparatur untuk dapat lebih meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat.

Sasaran utama dalam pelaksanaan program KB di Kota Bandung adalah Pasangan Usia Subur (PUS) antara usia 18 sampai 39 tahun yang berhak mendapatkan perlindungan dan hak reproduksi dalam membangun keluarga yang berkualitas. Komunikasi yang dilakukan oleh BPPKB Kota Bandung kepada calon peserta KB maupun peserta KB melalui iklan di media cetak maupun media elektronik, spanduk, brosur, *banner* dan poster, maupun promosi yang dilakukan oleh Puskesmas dan rumah sakit, biasanya iklan atau promosi tentang KB ada tulisan "Ayo Ikut KB 2 Anak Cukup". Selain itu, bagi masyarakat Kota Bandung yang ingin ber-KB bisa mendatangi langsung kantor BPPKB Kota Bandung maupun Puskesmas dan rumah sakit yang menyediakan pelayanan program KB. Dibawah ini merupakan salah satu brosur yang dibagikan kepada calon akseptor KB.

Komunikasi dalam program KB sudah tertuang dalam program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang merupakan suatu proses yang sangat penting dalam pelayanan KB di bidang kesehatan, untuk itu sangat penting pula bagi peserta KB untuk mengetahui pengertian KIE itu sendiri sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi kesehatan ibu dan anak, serta keluarga. Tujuan dilaksanakannya KIE adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktek KB sehingga tercapai penambahan peserta baru, membina kelestarian peserta KB, meletakkan dasar bagi mekanisme sosio-kultural yang dapat menjamin berlangsungnya proses penerimaan dan Mendorong terjadinya proses perubahan perilaku ke arah yang positif, peningkatan pengetahuan, sikap dan praktik masyarakat (klien) secara wajar sehingga masyarakat melaksanakannya secara mantap sebagai perilaku yang sehat dan bertanggung jawab.

Proses komunikasi di dalam implementasi kebijakan program KB di Kota Bandung terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan seperti transmisi yang merupakan penyaluran komunikasi antara aparatur dengan masyarakat, kejelasan komunikasi yang diterima oleh aparatur, dan konsistensi perintah yang diberikan mengenai pelaksanaan program KB di Kota Bandung. Indikator-indikator tersebut diarahkan untuk mengetahui bagaimana komunikasi yang terjadi antar aparatur dengan masyarakat mengenai implementasi program KB di Kota Bandung.

Sumber Daya dalam Program KB di Kota Bandung

Sumber daya di dalam pelaksanaan program KB di Kota Bandung adalah aparatur dan para pelaksana di lapangan, oleh karena itu, para aparatur dan pelaksana ini harus diberdayakan supaya kemampuannya meningkat dalam melayani masyarakat. Selain itu ada sumber daya yang bisa diperbarui seperti alat pendukung atau fasilitas dalam program KB seperti alat kontrasepsi contohnya adalah kondom dan suntik yang bisa digunakan untuk jangka panjang.

Sumber daya selain aparatur, sumberdaya-sumberdaya lainnya yang perlu diperhatikan juga adalah sumber daya waktu dan sumber daya keuangan. Karena apabila di dalam suatu pelaksanaan program anggarannya tidak mencukupi maka akan menjadi persoalan yang pelik untuk merealisasikan apa yang akan dituju dalam suatu program tersebut walaupun manusia nya memiliki kompetensi dan kapabilitas. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan lancar, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi suatu program.

Sumber daya dalam pelaksanaan meliputi sumber daya manusia yaitu aparatur, para pelaksana dan masyarakat sebagai akseptor KB. sumber daya manusia harus didukung oleh sumber daya lainnya seperti informasi yang dibutuhkan oleh aparatur, pelaksana dan masyarakat, anggaran yang mencukupi untuk teknis operasional program KB dan juga fasilitas sebagai sarana dan prasarana pendudukung program KB seperti alat kontrasepsi. Jadi semua sumber daya harus lengkap untuk keberhasilan program KB.

Disposisi atau Sikap Pelaksana dalam Program Keluarga Berencana (KB) di Kota Bandung

Perilaku atau karakteristik dari aparatur pelaksana program KB di Kota Bandung berperan sangat penting untuk mewujudkan pelaksanaan yang hasilnya sesuai

dengan tarhet dan tujuan. Maksud dari karakter disini adalah kesungguhan dan komitmen yang tinggi dari para pelaksana dalam menjalankan tugasnya dan mengarahkan implementor untuk tetap berada di jalur yang benar yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas dan wewenangnya sehingga pelaksanaan program KB akan berjalan dengan baik dan lancar.

Efek disposisi dan insentif atau upah lebih akan menimbulkan sikap menerima, acuh tak acuh dan sikap menolak dari aparatur terhadap kebijakan. Sikap menerima, acuh tak acuh dan sikap menolak dari aparatur akan menimbulkan disposisi pada diri pelaksana kebijakan dan disposisi yang tinggi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Karakteristik sikap pelaksana dalam melaksanakan program KB di Kota Bandung dapat dilihat melalui struktur organisasi, aturan-aturan dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Struktur organisasi merupakan acuan dasar bagi pelaksana mengenai pembagian tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Struktur organisasi mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan program KB di Kota Bandung dimana suatu kebijakan yang dibuat dimulai dari atasan untuk kemudian aparatur menjalankan kebijakan tersebut.

Struktur Birokrasi BPPKB Kota Bandung dalam Program Keluarga Berencana (KB) di Kota Bandung

Struktur birokrasi BPPKB Kota Bandung dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi nya masing-masing, sehingga tidak dibenarkan melaksanakan tugas yang bukan kewenangannya karena akan terjadi tumpang tindih kewenangan. Apabila ada bagian di dalam struktur organisasi yang melanggar, maka akan diberikan peringatan terlebih dahulu sebelum kemudian dijatuhkan sanksi atau hukuman, hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi dalam bekerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Struktur organisasi BPPKB Kota Bandung dibentuk berdasarkan kebutuhan jadi bagian atau bidang yang dibentuk sesuai dengan tugas pokok di bidang KB dan pemberdayaan perempuan yaitu bagian yang dibentuk adalah bagian kesehatan, bagian pengendalian penduduk, bagian KB, bagian program dan bagian pemberdayaan perempuan, itu merupakan hal-hal teknis. Sedangkan hal-hal non teknis nya adalah bagian keuangan dan kepegawaian.

Struktur organisasi BPPKB Kota Bandung mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah. Struktur organisasi dibentuk berdasarkan kebutuhan dari setiap

lembaga dimana setiap lembaga mempunyai peranan yang berbeda-beda di dalam kegiatan pemerintahan. Struktur birokrasi terdiri atas dua indikator yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan program Keluarga Berencana (KB) di Kota Bandung maka peneliti mengemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses komunikasi yang berlangsung belum berjalan efektif di dalam implementasi program KB di Kota Bandung, dikarenakan kurangnya sosialisasi. Proses penyampaian informasi antar aparatur maupun dengan masyarakat peserta KB berjalan sesuai dengan prosedur. Kejelasan penyampaian informasi antara aparatur dengan masyarakat cukup efektif dan efisien, mudah dimengerti, dipahami dan dapat dipertanggung jawabkan. Konsistensi penyampaian informasi dalam pelaksanaan program KB sudah konsisten tetapi terkadang selalu ada perubahan di dalam perintah dan keputusan.
2. Sumber daya sebagai faktor penggerak di dalam pelaksanaan program KB di Kota Bandung. Sumber daya manusia yang tersedia belum mampu menjalankan tugasnya dengan baik dikarenakan kekurangan tenaga KB di lapangan. Informasi yang dibutuhkan dan yang diterima sudah jelas dalam pelaksanaannya. Anggaran yang tersedia sudah mencukupi untuk melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program KB tersebut. Fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan program KB sudah mencukupi karena tinggal menunggu partisipasi dari masyarakat.
3. Disposisi dalam pelaksanaan program KB di Kota Bandung cukup baik, tingkat kepatuhan para aparatur pelaksana yang tinggi sesuai dengan peraturan dan adanya pemberian upah lebih (bonus) kepada aparatur pelaksana dapat mempengaruhi sikap pelaksana dalam melaksanakan program KB di Kota Bandung.
4. Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan program KB di Kota Bandung belum berjalan maksimal, hal ini dikarenakan ada beberapa SOP yang belum terlaksana dan penyebaran tanggung jawab telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Berdasarkan kesimpulan yang sudah peneliti ungkapkan, maka peneliti akan mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan oleh aparatur BPPKB Kota Bandung dalam

pelaksanaan program KB di Kota Bandung. Saran-saran tersebut antara lain:

1. Tingkatkan kualitas aparatur di dalam proses komunikasi antara aparatur maupun aparatur dengan masyarakat. Alur informasi harus dipercepat untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi dan juga pengembangan teknologi informasi dengan meningkatkan sistem informasi.
2. Tingkatkan kualitas dan kompetensi aparatur dengan cara melakukan pelatihan dan pendidikan secara kontinu, serta tambah jumlah petugas KB di lapangan sesuai dengan kebutuhan.
3. Diharapkan untuk BPPKB Kota Bandung agar lebih berhati-hati dalam faktor disposisi yang meliputi, pengangkatan birokrasi dan insentif pada pelaksana.
4. Diperlukan struktur birokrasi yang efektif dan efisien, SOP yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan fragmentasi dilakukan sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

DAFTAR RUJUKAN

Buku-buku

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Anderson, James. 1984. *Public Policy-Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Edward III, C George. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quartely Inc.

Easton, David. 1965. *A Systems Analysis of Political Life*. New York: Wiley.

Erwan, Agus P. dan Dyah Ratih S. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Eyestone, Robert. 1971. *The Treads of Public Policy: A Study in Policy Leadership*. Indianapolis: Boobs-Merrill.

Faried, Ali. dan Andi Syamsu A. 2011. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Refika Makassar: Aditama.

Friedrich, Carl J. 1963. *Man and His Government*. Newyork: McGraw-Hill.

Grindle, M.S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the third world*. New Jersey:Princeton University Press.

Heinz, Eulau. and Kenneth Prewitt. 1973. *Labyrinths Of Democrazy*. Indianapolis: Boobs Merrill.

Hogwood, B.. and L. Gunn. 1984. *Policy Analysis in the Real World*. Oxford: Oxford University Press.

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga

Jenkins, W.I. 1978. *Public Analysis*. Oxford: Martin Robertson.

Laster dan Stewart (2000). *Public Policy*. Australia: Wadsworth

Laswell, Harold D. and Abraham Kaplan. 1970. *Power and Society*. New Haven:
Yale University Press.

Mazmanian, D.A. and Sabatier, P.A. 1981. *Effective Policy Implementation*. Lexington : Heath and Co.

Mazmanian, Daniel. and Paul Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, London: Scott, Foressman and Company.

Nakamura, R.T dan Smallwood, F. 1980. *The Politic of Policy Implementation*. New York: St. Martin's.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Pressman, Jeffey L. dan Wildavsky, Aaron 1973. *Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland*, Barkeley: University of California Press.

Pressman, J.L. and Wildavsky, 1973. *Implementation.* Barkley and Los Angeles: University of California Press.

Ripley, Randall B. 1985. *Policy Analysis in Political Science.* Chicago: Nelson-Hall Publisher.

Rondinelli, Nells. And G.S. Cheema. 1983. *Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience.* Washington D.C.: Congressional Quartely Inc.

Schneider, Anne L. 1982. *Studying Policy Implementation: a Conceptual Framework*. New York: Harper Collins.

Tachjan, Dr. H, M.Si. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI

van Meter, D. and C. van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process A Conceptual Framework.:* Ohio State University.

Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.